

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA HARI KEEMPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2025**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA HARI KETIGA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Hari : Senin
 Tanggal : 6 Juli 2026
 Pukul : 11.20 – 12.25 WIB
 Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Lamongan

I. Jenis Rapat : Paripurna

II. Sifat Rapat : Terbuka

III. Acara Rapat : 1. Pembukaan Rapat Paripurna
 2. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
 3. Pendapat Akhir atau Sambutan Bupati
 4. Penutupan Rapat Paripurna

IV. Pimpinan Rapat

Nama : MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lamongan

V. Sekretaris Rapat

Nama : PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

VI. Jumlah Seluruh Anggota Dewan

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	12	orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	10	orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	7	orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	6	orang

5. Fraksi Partai Amanat Nasional	:	5	orang
6. Fraksi Partai Demokrat	:	5	orang
7. Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera	:	5	orang
JUMLAH	:	50	orang

VII. Jumlah Anggota Dewan Yang Hadir

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	9	orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	9	orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	5	orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	5	orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	:	2	orang
6. Fraksi Partai Demokrat	:	2	orang
7. Fraksi NasDeM Ummat Keadilan Sejahtera	:	2	orang
JUMLAH	:	34	orang

Yaitu :

1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.
2. H. ALI AFANDI
3. FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.
4. NURHASYIM, S.IP.
5. SAIFUDDIN ZUHRI
6. ASLICHAH, S.Pd.
7. SUHERMAN
8. ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.
9. ANDRIYATI KUSUMAWARDANI

2) Fraksi Partai Golongan Karya

1. Drs. H. KACUNG PURWANTO

2. H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.
3. M. FAISOL RAMA HAKIM
4. TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.
5. DIDIK BIYANTO, S.H.
6. Ir. SUYATMOKO, M.M.
7. A. FATHONI, S.S.
8. Drs. NA'IM, M.Ag.
9. Drs. MUTOYO, M.Pd.

3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. HUSEN, S.Ag., M.Pd.
2. ERNA SUJARWATI, S.Pd.
3. Hj. NING DARWATI
4. Ir. SUPONO
5. AHMAD UMAR BUWANG, S.H.

4) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.
2. Drs. H. SUHARTONO
3. DIMYATI, S.H.
4. SULASTRI, S.E.
5. H. SRINOTO, S.E.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

1. ALI MAKHFUDL, S.Ag., SH., MM
2. HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.

6) Fraksi Partai Demokrat

1. MIMMAS'IDAH, S.E.
2. BUDI SULIS SETIYO

7) Fraksi NUKS

1. MUSLIKH
2. H. TASIRIN, S.H., M.H.

VIII. Jumlah Anggota Dewan Yang Tidak Hadir

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 2 orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	: 1 orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	: 3 orang
6. Fraksi Partai Demokrat	: 3 orang
7. Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	: 16 orang

Yaitu :

1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. AH. MUJTABA, S.E.
2. MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.
3. MAHFUD SHODIQ, S.Sos.

2) Fraksi Partai Golongan Karya

1. MUDZAKIR

3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. BUSONO ADI SUSANTO
2. META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd

4) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. ANSHORI, S.Sos.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

1. WIJI, S.E.
2. AHMAD, S.Ag.
3. NASRUDIN, S.T.

6) Fraksi Partai Demokrat

1. Ir. SUGENG SANTOSO
2. ALDINO HADY WIJAYA
3. BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ

7) Fraksi NUKS

1. ROFIU'UDIN
2. MUHAMMAD ZAHLUL KAHELIQBAL, S.Pn.
3. RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.

IX. Undangan

1. Bupati Lamongan
2. Wakil Bupati Lamongan
3. Kapolres Lamongan
4. DANDIM 0812 Lamongan
5. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
6. Ketua Kejaksaan Negeri Lamongan
7. Ketua Pengadilan Agama Kab. Lamongan
8. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
9. Sekretaris DPRD
10. Staf Ahli Bupati
11. Asisten Sekretaris Daerah
12. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
13. Kepala Badan dan Kepala Dinas Perangkat Daerah Kab. Lamongan
14. Camat se-Kab. Lamongan

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, dimulai.

Mengawali acara hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars Lamongan hadirin dimohon berdiri.

LAGU DIKUMANDANGKAN

Hadirin dimohon duduk Kembali. Kepada Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada Pimpinan Rapat.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. – Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Sdr. Bupati;

Yang Terhormat Sdr. Wakil Bupati;

Yang Saya Hormati Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan rekan-rekan Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum Rapat Paripurna ini kita buka, Saya minta dari Sekretariat DPRD untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD dari masing-masing Fraksi. Dipersilahkan!

Sekretariat DPRD :

(USMAN, S.E., M.M. – Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan)

Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing Fraksi, pada Rapat Paripurna Hari Keempat dalam rangka Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, sebagai berikut :

- Satu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 12, jumlah yang hadir 9, jumlah yang tidak hadir 3.
- Dua, Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 10, jumlah yang hadir 9, jumlah yang tidak hadir 1.
- Tiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 7, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 2.
- Empat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 6, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 1.
- Lima, Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 2, jumlah yang tidak hadir 3.
- Enam, Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 2, jumlah yang tidak hadir 3.
- Tujuh, Fraksi NUKS, jumlah anggota 2, jumlah yang hadir 2, jumlah yang tidak hadir 3.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. – Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Terima kasih.

Berdasarkan daftar hadir dari 50 Anggota Dewan yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi, telah hadir sebanyak 43 Anggota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, kuorum telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucap "Bismillahirrahmanirrahiim".

Rapat Paripurna Hari Keempat dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari ini Senin, tanggal 6 Juli 2026 pukul 10.00 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUKAN PALU 3 KALI

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,

Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,

Menanggapi Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD pada Rapat Paripurna Hari Pertama tanggal 12 Juni 2026, masing-masing Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna Hari Kedua tanggal 17 Juni 2026. Kemudian Saudara Bupati telah Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Hari Ketiga tanggal 22 Juni 2026 lalu, sehingga dapat memberikan gambaran dan memperjelas Badan Anggaran dalam menelaah, menanggapi, mencermati dan membahas Rancangan Peraturan Daerah ini.

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat, Menindaklanjuti Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk mengetahui hasil pembahasan, marilah kita dengarkan bersama Laporan Badan Anggaran, yang akan disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran.

Untuk itu kepada Yth. **Ir. SUYATMOKO, M.M.** kami persilahkan.

LAPORAN BADAN ANGGARAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Disampaikan pada :
**Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan**

LAPORAN
BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ATAS
HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

HARI SENIN, TANGGAL 6 JULI 2026

Juru Bicara : **Ir. SUYATMOKO**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati;

Yang Saya Hormati Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dan Direktur BUMD, serta rekan-rekan wartawan dan undangan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam suasana persaudaraan yang penuh berkah dan rahmat Allah SWT. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat,

Mengawali laporan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna yang terhormat ini.

Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ke 10 (sepuluh) kalinya secara berturut-turut. Opini ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah karena menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Hari Pertama dan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Hari Ketiga, sehingga dapat memberikan gambaran dan memperjelas Badan Anggaran dalam menelaah, menanggapi, mencermati dan membahas Rancangan Peraturan Daerah ini.

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah

disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI Perwakilan Jawa Timur, sehingga telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran.

Untuk itu, Badan Anggaran menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah atas terlaksananya penyampaian Rancangan Peraturan Daerah secara tepat waktu, sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perkenankanlah kami menyampaikan laporan, sebagai berikut :

I. Dasar Pembahasan :

1. Surat Saudara Bupati Tanggal 11 Juni 2026 Nomor 903/234/413.201/2026, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 30 Juni 2026.

II. Hasil Pembahasan

Dari hasil pembahasan bersama, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar **3** trilyun **237** milyar **843** juta **583** ribu **900** rupiah, terealisasi sebesar **3** trilyun **217** milyar **044** juta **298** ribu **581** rupiah **15** sen atau **99,35** persen, dengan perincian :

- a. Pendapatan Asli Daerah
Dianggarkan sebesar **682** milyar **224** juta **264** ribu **129** rupiah, terealisasi sebesar **680** milyar **859** juta **068** ribu **912** rupiah **15** sen atau **99,79** persen.
- b. Pendapatan Transfer
Dianggarkan sebesar **2** trilyun **555** milyar **619** juta **319** ribu **771** rupiah, terealisasi sebesar **2** trilyun **536** milyar **185** juta **229** ribu **669** rupiah atau **99,23** persen.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Tahun 2025 tidak dianggarkan, sehingga tidak terdapat realisasi pendapatan di tahun tersebut.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dialokasikan sebesar **3** trilyun **323** milyar **392** juta **739** ribu **516** rupiah **77** sen, terealisasi sebesar **3** trilyun **175** milyar **564** juta **168** ribu **282** rupiah **51** sen atau **95,55** persen, terdiri dari komponen :

- a. Belanja Operasional
Dianggarkan sebesar **2** trilyun **244** milyar **817** juta **329** ribu **932** rupiah **77** sen, terealisasi sebesar **2** trilyun **144** milyar **903** juta **263** ribu **796** rupiah **01** sen atau **95,54** persen.
- b. Belanja Modal
Dianggarkan sebesar **424** milyar **011** juta **824** ribu **053** rupiah, terealisasi sebesar **409** milyar **659** juta **784** ribu **107** rupiah **50** sen atau **96,61** persen.
- c. Belanja Tak Terduga
Dianggarkan sebesar **4** milyar **50** juta rupiah, terealisasi sebesar **816** juta **519** ribu **778** rupiah atau **20,16** persen.
- d. Belanja Transfer
Dianggarkan sebesar **650** milyar **513** juta **585** ribu **531** rupiah terealisasi sebesar **620** milyar **184** juta **600** ribu **601** rupiah atau **95,33** persen.

Sehingga pada Tahun Anggaran 2025 mengalami Surplus sebesar **41** milyar **480** juta **130** ribu **298** rupiah **64** sen.

3. Pembiayaan Daerah

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar **94** persen, yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar **83** milyar **238** juta **247** ribu **379** rupiah **77** sen atau **94** persen. Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **3** Miliar Rupiah, tidak terdapat realisasi dalam Tahun tersebut, maka pembiayaan **Netto** tercatat sebesar **83** milyar **238** juta **247** ribu **379** rupiah **77** sen.

SILPA sebesar **124** milyar **718** juta **377** ribu **678** rupiah **41** sen.

III. Pendapat dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran menyampaikan pendapat dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku;
2. Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disepakati antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan dapat diterima.

IV. Saran dan Harapan

1. Badan Anggaran meminta dalam penulisan pada sambutan Nota Pengantar Bupati dan buku Raperda Pertanggungjawaban agar nominal angka di sinkronkan;
2. Badan Anggaran mengharapkan apabila ada perubahan nominal anggaran sebelum ataupun sesudah perubahan APBD dapat dilaporkan kepada DPRD;

3. Badan Anggaran mengharapkan agar Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan dan memperjelas lagi langkah-langkah konkrit terkait dengan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai sumber antara lain:
 - a. Bagi hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - b. Pajak dan Retribusi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C);
 - c. Pajak dan Retribusi yang dapat dihasilkan dari Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan berupa Aset bergerak dan tidak bergerak;
 - d. Pengkajian kembali terhadap Pajak dari NJOP yang didasarkan Pada Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Badan Anggaran meminta agar kedepannya Pemerintah Daerah memberikan perbandingan PAD dari sektor-sektor potensial dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan, sehingga dapat diketahui mana saja PAD yang naik dan turun.
4. Sebagai mitra kerja, Badan Anggaran berharap adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang pembangunan daerah maupun APBD, demi mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan;

V. Persetujuan

Setelah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran memohon Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Forum Rapat Paripurna Yang Terhormat

ini dan diajukan Evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

VI. Penutup

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat,

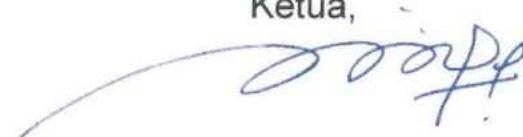
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 6 Juli 2026

PIMPINAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,


MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, SE

Wakil Ketua I,



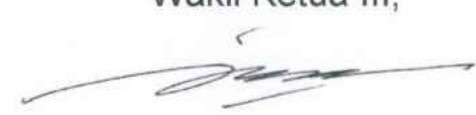
Drs. H. KACUNG PURWANTO

Wakil Ketua II,



HUSEN, S. Ag., M.Pd

Wakil Ketua III,



IMAM FADDLI, S.IP., M.Si

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :**(MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. – Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)**

Disampaikan terima kasih.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Setelah kita bersama-sama mendengarkan Laporan Badan Anggaran, maka kami tawarkan dalam Rapat Dewan yang terhormat ini:

"SETUJUKAH SAUDARA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 INI
DISAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH???" **"SETUJU"**

KETUKAN PALU 1 KALI

Disampaikan terima kasih.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, kita ikuti penandatanganan bersama NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN PIMPINAN DPRD, dilanjutkan dengan penyerahan berkas hasil pembahasan.

Hadirin dimohon berdiri.

PENANDATANGANAN PERSETUJUAN DAN PENYERAHAN BERKAS

Disampaikan terima kasih.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, mari kita dengarkan Bersama Sambutan Bupati Lamongan.

Kepada Yang Terhormat Saudara Bupati kami persilahkan.

SAMBUTAN BUPATI



BUPATI LAMONGAN

**PIDATO RAPAT PARIPURNA DPRD
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YANG SAYA HORMATI:

- KETUA, WAKIL KETUA, DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMONGAN;
- WAKIL BUPATI LAMONGAN;
- JAJARAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KAB. LAMONGAN;
- SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, INSPEKTUR, PARA ASISTEN, STAF AHLI , KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN PIMPINAN BUMD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN;
- REKAN-REKAN WARTAWAN, SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG SAYA HORMATI.

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN TAHAPAN AKHIR DARI SELURUH RANGKAIAN PEMBAHASAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

LANGKAH INI MENEGASKAN BERJALANNYA MEKANISME *CHECK AND BALANCE* ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMPERKUAT AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN, SAYA MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD, KHUSUSNYA BADAN ANGGARAN, YANG BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TELAH MENCERMATI, MENDALAMI, DAN MEMBAHAS RANCANGAN REGULASI SECARA SINGGUH-SINGGUH.

DINAMIKA YANG BERLANGSUNG MENCERMINKAN KEMITRAAN YANG KUAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN, PENGAWASAN, DAN REPRESENTASI.

BERBAGAI PANDANGAN, MASUKAN, DAN PENYEMPURNAAN YANG BERKEMBANG MENJADI CATATAN PENTING DALAM MENAIKKAN MUTU PENGELOLAAN KEUANGAN SEKALIGUS MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN KE DEPAN.

SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA

SUBSTANSI PERTANGGUNGJAWABAN APBD TENTU TIDAK HANYA MENYAJIKAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN, MELAINKAN MENCERMINKAN KUALITAS MANAJERIAL KEUANGAN SELAMA SATU TAHUN ANGGARAN.

SEPANJANG TAHUN ANGGARAN 2025, PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KONSISTEN MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KAPASITAS FISKAL DAN PENUNTASAN BERBAGAI ISU STRATEGIS DAERAH.

DARI SISI PENDAPATAN DAERAH, REALISASI BERHASIL DIOPTIMALKAN MELALUI PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPTIMALISASI DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, SERTA SEKTOR LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

SEJALAN DENGAN ITU, BELANJA DAERAH KITA FOKUSKAN UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN DASAR, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, PENGUATAN EKONOMI, HINGGA PENGENTASAN KEMISKINAN. LANGKAH INI MENJADI

KOMITMEN KITA AGAR SETIAP RUPIAH ANGGARAN MEMBERIKAN MANFAAT LANGSUNG BAGI SELURUH MASYARAKAT. LEBIH DARI ITU, KEBIJAKAN PENGANGGARAN JUGA DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG SASARAN PEMBANGUNAN MELALUI IMPLEMENTASI 15 PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

SELURUH PROGRAM TERSEBUT JUGA TELAH KITA SELARASKAN DENGAN NAWA BAKTI SATYA PROVINSI JAWA TIMUR SERTA ASTA CITA SEBAGAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL. SEHINGGA APBD DIHARAPKAN MAMPU MEMPERKUAT DAYA SAING SEKALIGUS MENGAKSELERASI KESEJAHTERAAN.

SEMENTARA PADA ASPEK PEMBIAYAAN DAERAH, PENGELOLAAN DILAKUKAN SECARA PRUDENT DAN AKUNTABEL DEMI MENJAGA STABILITAS FISKAL.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA INI SELANJUTNYA AKAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK DILAKUKAN EVALUASI.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BERKOMITMEN PENUH UNTUK MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI TERSEBUT SECARA CERMAT DAN TEPAT WAKTU. LANGKAH INI MERUPAKAN BENTUK KEPATUHAN SEKALIGUS UPAYA NYATA KITA DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS.

AKHIRNYA, MELALUI MOMENTUM RAPAT PARIPURNA INI, MARI KITA MAKNAI SETIAP PROSES YANG TELAH DILALUI SEBAGAI IKHTIAR KOLEKTIF ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD. KITA HARUS MEMASTIKAN SETIAP KEBIJAKAN ANGGARAN SENANTIASA BERORIENTASI PADA KINERJA, KEMANFAATAN, SERTA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN DEMI TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN.

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN. SEMOGA ALLAH SWT
SENANTIASA MEMBERIKAN KEKUATAN DAN KEBERKAHAN KEPADA
KITA SEMUA DALAM MENJALANKAN PENGABDIAN. TERIMA KASIH.

WASSALAMMU'ALAIKUM WR. WB.

LAMONGAN 6 JULI 2026

BUPATI LAMONGAN

YUHRONUR EFFENDI

Disampaikan terima kasih.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Demikianlah jalannya rapat paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wakil Bupati, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti Rapat Paripurna mulai Hari Pertama hingga Hari Keempat ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin rapat paripurna pada hari ini pukul 11.20 WIB kami nyatakan ditutup.

PEMBAWA ACARA :

Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri.

LAGU BAGIMU NEGERI DIKUMANDANGKAN

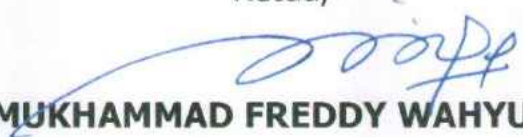
Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Demikian rangkaian acara Paripurna pada hari ini, terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua,


MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.

DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA HARI KEEMPAT DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
SENIN, 6 JULI 2026









**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI LAMONGAN DAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 900.1.15/30S.1/413.013/2026
900.1.15/ 3 /413.050/2026

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.EK.** : Bupati Lamongan, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
 2. **Mukhammad Freddy Wahyudi, S.E.** : Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
 3. **Drs. H. Kacung Purwanto** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
 4. **Husen, S.Ag., M.Pd.** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
 5. **Imam Fadlli, SIP., M.Si.** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
- Berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Menyatakan bahwa :

1. **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** telah membahas dan menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dengan penyesuaian dan perubahannya.
2. **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.
3. **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** menyelesaikan perubahan dan koreksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **Pihak Kesatu** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMONGAN,

Dr. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M.E.K.

Lamongan, 6 Juli 2026

KETUA DPRD,

MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.

WAKIL KETUA DPRD,

Drs. H. KACUNG PURWANTO

WAKIL KETUA DPRD,

HUSEN, S.Ag., M.Pd.

WAKIL KETUA DPRD,

IMAM FADLLI, SIP., M.Si.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 900.1.15.1/ 4 /KEP-DPRD/413.050/2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakan seluruh tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 680.859.068.912,15
2. Pendapatan Transfer	Rp 2.536.185.229.669,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp 3.217.044.298.581,15
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasional	Rp 2.144.903.263.796,01
2. Belanja Modal	Rp 409.659.784.107,50
3. Belanja Tak Terduga	Rp 816.519.778,00
4. Belanja Transfer	Rp 620.184.600.601,00
Jumlah Belanja	Rp 3.175.564.168.282,51
Surplus/Defisit	Rp 41.480.130.298,64
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya)	Rp 83.238.247.379,77
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
3. Pembiayaan Netto	Rp (83.238.247.379,77)
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	Rp 124.718.377.678,41

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Juli 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,



MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI

Wakil Ketua,

KACUNG PURWANTO

Wakil Ketua,

HUSEN

Wakil Ketua,

IMAM FADLLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
-

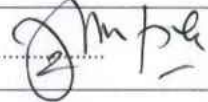
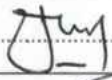
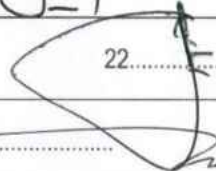
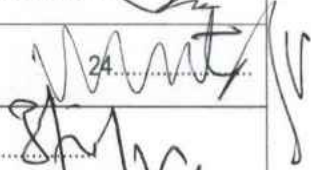
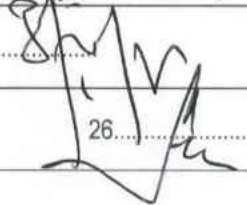
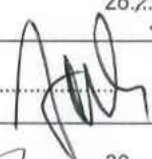
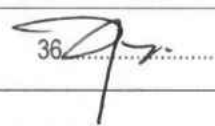
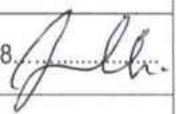


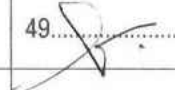
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

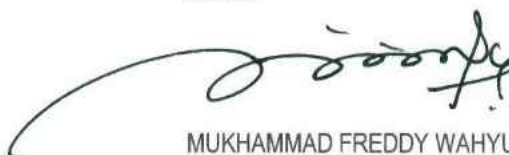
DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 HARI SENIN, TANGGAL 06 JULI 2026

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.	KETUA	PKB	
2	Drs. H. KACUNG PURWANTO	WAKIL KETUA	P.GOLKAR	
3	HUSEN, S.Ag., M.Pd	WAKIL KETUA	PDIP	
4	IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.	WAKIL KETUA	P.GERINDRA	
5	H. ALI AFANDI	ANGGOTA	PKB	
6	AH MUJTABA, S.E.	ANGGOTA	PKB	
7	NUR HASYIM, S.IP.	ANGGOTA	PKB	
8	MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.	ANGGOTA	PKB	
9	MAHFUD SHODIQ, S.Sos.	ANGGOTA	PKB	
10	SUHERMAN	ANGGOTA	PKB	
11	FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.	ANGGOTA	PKB	
12	ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.	ANGGOTA	PKB	
13	SAIFUDDIN ZUHRI	ANGGOTA	PKB	
14	ASLICHAH, S.Pd.	ANGGOTA	PKB	
15	ANDRIATI KUSUMAWARDANI	ANGGOTA	PKB	
16	H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.	ANGGOTA	P.GOLKAR	
17	M. FAISOL RAMA HAKIM	ANGGOTA	P. GOLKAR	
18	TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.	ANGGOTA	P. GOLKAR	

19	DIDIK BIYANTO, S.H.	ANGGOTA	P. GOLKAR	19..... 
20	MUDZAKIR	ANGGOTA	P. GOLKAR	20.....
21	A. FATHONI, S.S.	ANGGOTA	P. GOLKAR	21..... 
22	Ir. SUYATMOKO, M.M.	ANGGOTA	P. GOLKAR	22..... 
23	Drs. NA'IM, M.Ag.	ANGGOTA	P. GOLKAR	23.....
24	Drs. MUTOYO, M.Pd.	ANGGOTA	P. GOLKAR	24..... 
25	ERNA SUJARWATI, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	25..... 
26	Ir. SUPONO	ANGGOTA	PDIP	26.....
27	BUSONO ADI SUSANTO	ANGGOTA	PDIP	27.....
28	Hj. NING DARWATI	ANGGOTA	PDIP	28..... 
29	AHMAD UMAR BUWANG, S.H.	ANGGOTA	PDIP	29..... 
30	META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	30.....
31	H. SRINOTO, S.E.	ANGGOTA	P.GERINDRA	31..... 
32	Drs. H. SUHARTONO	ANGGOTA	P.GERINDRA	32.....
33	DIMYATI, S.H.	ANGGOTA	P.GERINDRA	33..... 
34	SULASTRI, S.E.	ANGGOTA	P.GERINDRA	34..... 
35	ANSHORI, S.Sos.	ANGGOTA	P.GERINDRA	35.....
36	ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.	ANGGOTA	PAN	36..... 
37	NASRUDIN, S.T.	ANGGOTA	PAN	37.....
38	HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PAN	38..... 
39	WIJI, S.E.	ANGGOTA	PAN	39.....
40	AHMAD, S.Ag.	ANGGOTA	PAN	40.....

41	MIMMAS'IDAH, S.E.	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	41..... 
42	Ir. SUGENG SANTOSO	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	42.....
43	BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	43.....
44	ALDINO HADY WIJAYA	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	44.....
45	BUDI SULIS SETIYO	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	45..... 
46	MUHAMMAD ZAHLUL KAHEL IQBAL, S.Pn.	ANGGOTA	NUKS	46.....
47	MUSLIKH	ANGGOTA	NUKS	47..... 
48	RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.	ANGGOTA	NUKS	48.....
49	H. TASIRIN, S.H., M.H.	ANGGOTA	NUKS	49..... 
50	ROFI'UDIN	ANGGOTA	NUKS	50.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
KETUA



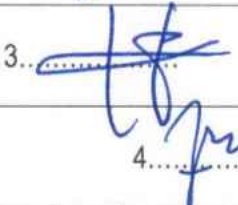
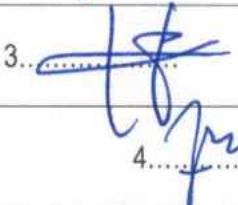
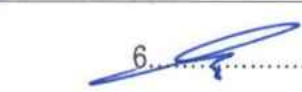
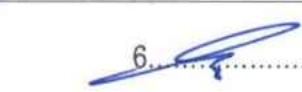
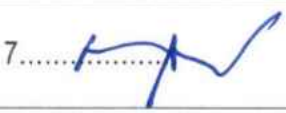
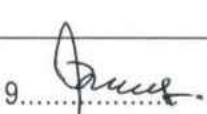
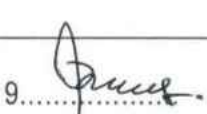
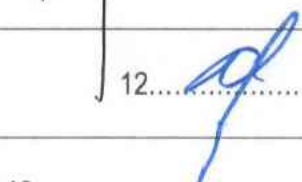
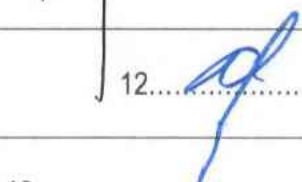
MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.



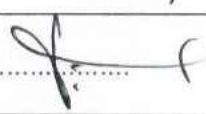
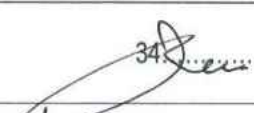
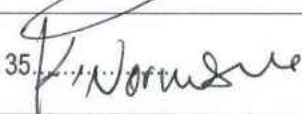
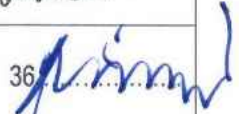
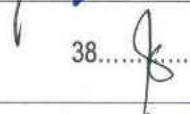
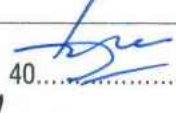
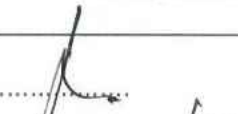
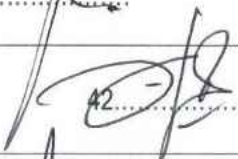
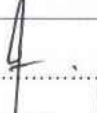
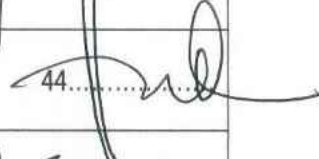
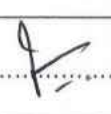
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

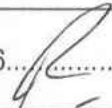
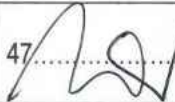
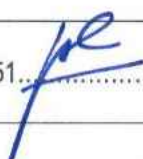
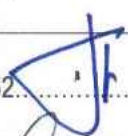
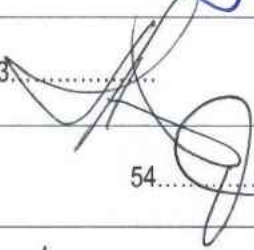
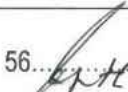
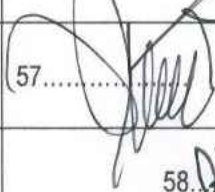
Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
HARI SENIN, TANGGAL 06 JULI 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA. NIK.	BUPATI	1..... 
2	DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T.,B.Eng.,M.Sc NIK.	WAKIL BUPATI	2..... 
3	AKBP ARIF FAZLURRAHMAN, S.H., S.I.K., M.Si NRP.	KAPOLRES	3..... 
4	LETKOL INF DENI SURYO ANGGO DIGDO NRP.	KOMANDAN KODIM 0812	4..... 
5	BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. NIK.	KETUA PENGADILAN NEGERI	5..... 
6	HENDRO WASISTO, S.H., M.H. NIK.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	6..... 
7	Drs. MOH. NALIKAN, M.M. NIP. 19690703 198911 1 001	SEKRETARIS DAERAH	7..... 
8	PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M. NIP.19691008 1995031 003	SEKRETARIS DPRD	8..... 
9	JOKO NURSIYANTO, S.H, M.H NIP.19650706 199203 1 014	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	9..... 
10	NIP.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	10..... 
11	ETIK SULISTYANI , S.Sos, M.Si NIP.19710722 199203 2 005	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	11..... 
12	A.FARIKH, S.H., M.M. NIP. 19670516 199602 1 003	INSPEKTUR	12..... 
13	Drs.FADHELI PURWANTO, M.M. NIP.	STAF AHLI BUPATI BID. KEMASYARAKATAN & SDM	13..... 

14	KANDAM, S.Pd., M.Pd.	STAF AHLI BUPATI BID. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	14.....
	NIP. 19670315 199412 1 003		
15		STAF AHLI BUPATI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	15.....
	NIP.		
16	H.RIDWAN FAUZI, S.Ag. M.H	KETUA PENGADILAN AGAMA	16.....
	NIP.		
17	SUJARWO, ST., MM.	KEPALA BEPPERIDA	17.....
	NIP. 19740903 200112 1 005		
18	FARAH DAMAYANTI Z., S.Sos., M.Si.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	18.....
	NIP. 19730509 199803 2 005		
19	JOHNY INDRIANTO FIRMANSYAH, S.STP., M.Si.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.....
	NIP. 19830430 200112 1 002		
20	Drs. MUHAMMAD SATUWI HERUWIDI, MM.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	20.....
	NIP. 19690517 198809 1 001		
21	EDY YUNAN A., SSTP, M.Si.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.....
	NIP. 19801027 199912 1 001		
22	SAMI'AN, S.E., M.M.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.....
	NIP. 19700714 199303 1 001		
23		KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.....
	NIP.		
24	DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.....
	NIP. 19781204 201001 2 011		
25	dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	25.....
	NIP.		
26	dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Kes.	KEPALA DINAS KESEHATAN	26.....
	NIP. 19661113 199703 1 002		
27	Drs. SHODIKIN. M.Pd	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	27.....
	NIP. 19661019 198703 1 008		
28	ANDHY KURNIAWAN, S.T, M.MT.	KEPALA DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	28.....
	NIP. 19750511 200604 1 011		
29	ERWIN SULISTYA PAMBUDI, S.T., M.M.	KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	29.....
	NIP. 19770327 200312 1 006		

30	Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.Si NIP. 19710424 199101 1 001	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	30..... 
31	UMURONAH, S.S.T., M.Kes. NIP.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	31..... 
32	Drs. DIANTO HARI WIBOWO NIP. 19760410 199412 1 002	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	32..... 
33	GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, S.E., M.Si. NIP.	KEPALA DINAS SOSIAL	33..... 
34	MOHAMMAD ZAMRONI, S.Sos, M.Si. NIP. 19730707 199303 1 010	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	34..... 
35	JARWITO, S.H. NIP. 19701022 199003 1 003	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35..... 
36	Dr. MUGITO, M.M. NIP. 196710241988091001	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	36..... 
37	YULI WAHYUONO, SH MM NIP. 19660727 198903 1 006	KEPALA DINAS PERIKANAN	37..... 
38	Dr. SHOFIAH NURHAYATI, S.P., M.Si. NIP. 19720420 199602 2 001	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38..... 
39	ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si. NIP. 19750404 199602 1 003	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39..... 
40	SUGENG WIDODO, S.Sos. MM NIP. 19681219 198903 1 002	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40..... 
41	SITI RUBIKAH, S.E., M.Si NIP. 19700607 199803 2 003	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	41..... 
42	JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP. NIP. 19780514 199711 1 001	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	42..... 
43	dr. ABDUR ROHMAN, Sp.PD. NIP.	DIREKTUR RSUD dr. SOEGIRI	43..... 
44	dr. HILDA NIP.	DIREKTUR RSUD NGIMBANG	44..... 
45	dr. MAYA DEWI H., M.MRS NIP. 19830220 2010 2 016	DIREKTUR RSUD KARANGKEMBANG	45..... 

46	dr. PANJUMI KHORIDA, M.Kes. NIP. 19770420 200604 2 026	DIREKTUR RSUD KI AGENG BRONDONG	46..... 
47	ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos., M.M. NIP. 19720205 190201 1 003	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47..... 
48	MOCH.NAIM, S.Sos., M.Si NIP. 19690324 198903 1 007	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA	48.....
49	M.RO'IS, SH, M.HUM NIP.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	49..... 
50	NURUL MUKMININ, S.E.,M.M NIP.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	50.....
51	NAZARUDDIN RAKHMAD SALEH, S.E., M.AP. NIP. 19760418 200312 1 004	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA	51..... 
52	TEGUH ALI SABUDI, S.T., M.M. NIP.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	52..... 
53	Dra. SRI RAHAYU, M.Si. NIP. 19690404 199503 2 003	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	53..... 
54	DAVID ASADI, SE NIP.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	54.....
55	NANIK PURWATI, S.E., M.M. NIP.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH SETDA	55..... 
56	DANDOKO HADI SUSANTO, S.T., M.T. NIP.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	56..... 
57	NUR RAHMAWATI NIP.	PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN	57..... 
58	L.M SYAHRIL NIP.	DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM	58..... 
59	NIP.	PERUMDA PASAR	59.....
60	AGUNG YULIANTO NIP.	DIREKTUR UTAMA PD ANEKA USAHA LAMONGAN JAYA	60..... 
61			61.....

62			62.....
63			63.....
64			64.....
65			65.....
66			66.....
67			67.....
68			68.....
69			69.....
70			70.....
71			71.....
72			72.....
73			73.....

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN


PUJOBROTO IRIAWAN. P. S.E.,M.M.,M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
HARI SENIN, TANGGAL 06 JULI 2026

NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS HENDRAWAN, SSTP.,M.AP. NIP. 19790208 199711 1 001	LAMONGAN	1.....
2	RAKHMAT HIDAYAT, S.H.MM NIP.	TURI	2.....
3	SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP NIP. 19851010 200602 1 001	DEKET	3.....
4	SUJIRMAN SHOLEH. SE.MM NIP. 19720909 200112 1 006	TIKUNG	4.....
5	ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP.19811107 200604 1 011	KEMBANGBAHU	5.....
6	ABDUL HADI, S.E.,M.M NIP.	SARIREJO	6.....
7	GATOT SUGIHARTO, S.E., M.M. NIP.	SUKODADI	7.....
8	RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M. NIP.	KARANGGENENG	8.....
9	AHMAD KURNIAWAN, S.STP.,M.Si NIP. 19850102 200312 1 001	SEKARAN	9.....
10	NURUL MISBAH, S.H.,M.M NIP.19700501 199302 1 005	PUCUK	10.....
11	TEGUH BAGIO, S.STP.,M.M NIP. 19780117 199711 1 002	MADURAN	11.....
12	NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP,M.AP NIP.19840301 200212 1 002	BABAT	12.....
13	SUTAJI, S.Kep, Ners, M.AP NIP. 19691210 199203 1 003	KEDUNGPRING	13.....
14	BAMBANG PURNOMO AP.M.M NIP. 19730922 199311 1 003	SUGIO	14.....
15	ANANG BUDI SANTOSA, S.H.,M.Si NIP.	MODO	15.....

16	ANTON SUJARWO, S.Pd.,M.M NIP.	NGIMBANG	16.....
17	M.EKO TRIPRASETYO, S.STP NIP.19871003 200602 1 001	BLULUK	17.....
18	SYAM TEGUH W, SH., MM. NIP. 19711031 199203 1 002	SAMBENG	18.....
19	ILYAS, S.Kep.,Ns NIP.	MANTUP	19.....
20	HARWAH YUTOMO, SH., MM. NIP. 19730201 199602 1 001	SUKORAME	20.....
21	ARIEF FAKHRUDIN AL HAKIM, S.STP.,M.Si NIP.	KARANGBINANGUN	21.....
22	KHOIRUL MUHSININ, S.Pd NIP.19690503 200902 1 001	KALITENGAH	22.....
23	SUTIKNO, S.Pd, M.M NIP.19700309 199104 1 001	GLAGAH	23.....
24	TEGUH BAGIO, S.STP., M.M. NIP.	PACIRAN	24.....
25	NURUL KHUMAIDAH, S.H.,M.M NIP. 19710807 200112 2 002	BRONDONG	25.....
26	SUKUR, S.Pd.,M.Pd NIP.19680621 199304 1 001	LAREN	26.....
27	TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE NIP. 19681130 201001 1 002	SOLOKURO	27.....

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

PUJOBROTO IRIAWAN. P. S.E.,M.M.,M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003